

BAB III

**PERAN PUSPITA BAHARI DESA MORODEMAK SEBAGAI
ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN NELAYAN**

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan dilapangan. Data diperoleh melalui observasi atau pengamatan pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Puspita Bahari, hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dan data-data arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan Organisasi Puspita Bahari. Pembahasan penelitian mengenai peran Puspita Bahari Desa Morodemak sebagai organisasi berbasis komunitas dalam pemberdayaan perempuan nelayan terbagi menjadi 3 sub bagian, pertama yaitu dibahas cara kerja organisasi Puspita Bahari dalam melakukan pemberdayaan perempuan nelayan. Sub bagian kedua menyajikan hasil pemberdayaan perempuan nelayan dan sub bagian ketiga memaparkan keberlanjutan organisasi Puspita Bahari dalam melakukan pemberdayaan perempuan nelayan.

3.1 Cara kerja Organisasi Puspita Bahari dalam pemberdayaan perempuan nelayan

Organisasi berbasis komunitas yang berorientasi pada pemberdayaan seperti Puspita Bahari pada dasarnya ingin mencapai berbagai tujuan dari program pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan melalui cara kerja organisasi sekalipun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Pada sub bagian ini peneliti menggunakan tiga dimensi menurut Jo Rowlands dimana pemberdayaan dapat beroperasi pada sebuah organisasi yaitu Dimensi *Personal*, Dimensi *Relational* dan Dimensi *Collectiv*.

3.1.1 Dimensi *Personal*

Pada dimensi ini merupakan upaya untuk mengembangkan rasa percaya diri, keyakinan serta kapasitas individu dan menghilangkan dampak dari penindasan yang dilakukan secara internal pada organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mutongu dalam penelitiannya yang berjudul “*Women’s Participation in Community-Based Organizations’ Development as a Strategy for Poverty Reduction in Kenya*” Pendidikan merupakan masalah utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan di organisasi berbasis komunitas karena berkaitan dengan pemberdayaan maka pendidikan menjadi alat untuk pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri. Hal serupa juga dilakukan oleh Puspita Bahari dalam mengembangkan rasa percaya diri dan kapasitas perempuan nelayan melalui pendidikan. Kutipan wawancara dengan Ibu Masnu’ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari berikut ini:

“Lewat pendidikan penyadaran hak, pendidikan kesadaran kritis hukum, pemberdayaan ekonomi, karena kami yakin kalau secara ekonomi mandiri maka dia akan punya akses untuk melakukan kegiatan positif”⁶⁰

Melalui pendidikan hukum yaitu pemberian sosialisasi dengan materi dasar seperti hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai perempuan. Pada pendidikan ekonomi perempuan diberikan keterampilan usaha yang selanjutnya berlanjut pada implementasi dari ilmu yang sudah diterima dengan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu’ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 20.41 WIB melalui sambungan telepon

mencoba membuat usaha ekonomi produktif. Dari pendidikan tersebut, perempuan dapat memahami sejauh mana kemampuan yang dimiliki mereka untuk dapat dikembangkan menjadi kekuatan agar terciptanya kemandirian dalam segala aspek kehidupan. Merujuk pada definisi konvensional yang diberikan Jo Rowlands arti dari *power* pada bidang ekonomi, kekuatan yang dimaksud yaitu pada kemampuan untuk mendapatkan pendapatan dan mampu untuk memaksimalkan kesempatan yang tersedia tanpa adanya hambatan.

Secara ekonomi, perempuan nelayan mampu mendapatkan pendapatan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui usaha ekonomi produktif yang dimiliki mereka dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Sesuai dengan wilayah tempat tinggal yang terletak di pesisir, maka perempuan memaksimalkan potensi ikan untuk dijadikan produk olahan berdasarkan pada kemampuan dan minat yang dimiliki. Pemberdayaan ekonomi merupakan strategi ampuh dalam meningkatkan keberdayaan perempuan karena salah satu tujuan dari adanya program pemberdayaan perempuan yaitu meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga maupun industri kecil untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga. Kegiatan tersebut dapat memberi manfaat bagi perempuan untuk memiliki usaha ekonomi produktif atau usaha skala rumah tangga maupun mengembangkan usaha bagi yang sebelumnya sudah memiliki. Namun, untuk menghilangkan perasaan ditindas yang dialami perempuan langkah yang dilakukan Puspita Bahari tidak cukup melalui pemberdayaan ekonomi aja melainkan juga melalui pemberdayaan psikologis.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari Pemberdayaan psikologis yang dimaksud yaitu pemberdayaan mental melalui konseling bekerjasama dengan CTRU Unika dan LBH APIK. Pemberdayaan psikologi melalui konseling tersebut dilakukan pada perempuan nelayan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan dilakukan agar perempuan bisa keluar dari masalahnya dan bisa melanjutkan kembali hidupnya tanpa adanya trauma berkepanjangan dengan pemberian motivasi dan saling menguatkan. Sebelum memberikan konseling Puspita Bahari memfasilitasi pendampingan kasusnya mulai dari proses hukum, pelayanan publik yang diperlukan dan pemenuhan kebutuhan oleh korban.

“Pendampingan psikologi dengan konseling CTRU Unika itu kan tim konseling psikolog yang bekerjasama dengan LBH APIK Untuk pendampingan korban secara pelayanan publik hukum, kesehatan jadi tidak hanya mendampingi kasusnya saja tapi juga kita memikirkan kebutuhan lain”

Pemberian segala fasilitas baik secara ekonomi maupun dari pendampingan kasus sampai pada pemulihan korban tersebut dilakukan agar trauma perempuan dari rasa penindasan hilang. Diharapkan perempuan memiliki kekuatan kembali terutama secara ekonomi untuk melanjutkan kehidupannya dimasyarakat. Kemandirian pada bidang ekonomi akan menimbulkan kepercayaan diri perempuan sehingga mereka sudah mampu tampil dipublik dengan rasa keberhasilan yang ada pada diri mereka.

3.1.2 Dimensi *Relational*

Pada dimensi kedua dari beroprasinya pemberdayaan ini yaitu mengembangkan kemampuan untuk bernegosiasi dan memengaruhi sifat hubungan dan keputusan yang dibuat di dalamnya. Rowlands menggunakan definisi konvensional dari *power over* bahwa pemberdayaan berarti membawa orang-orang yang berada diluar proses pengambilan keputusan untuk masuk kedalamnya. Hal ini berkaitan erat pada kemampuan interpersonal yaitu kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya. Kemampuan tersebut dikembangkan melalui internal organisasi ketika mereka sedang membuat keputusan bersama. Dari proses pengambilan keputusan tersebut terjadi negosiasi antar satu individu dengan yang lain untuk mencapai keputusan organisasi yang berlandaskan pada musyawarah mufakat.

Pada proses pengambilan keputusan dalam organisasi ini semua perempuan atau anggota berhak untuk menyatakan pendapat mereka masing-masing sehingga kesempatan seperti ini tentunya menjadi wadah bagi perempuan untuk terus mengembangkan kemampuan personal dalam berkomunikasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan menetapkan atas pilihan-pilihan dalam pembuatan keputusan bersama oleh perempuan nelayan. Pengembangan kemampuan bernegosiasi dan pengambilan keputusan juga dilakukan melalui kegiatan sekolah pelopor keadilan. Melalui kegiatan ini perempuan diberikan beberapa materi seperti pemahaman yang benar mengenai arti kodrat perempuan, hak-hak dasar perempuan sebagai warga Negara Indonesia maupun penyuluhan hukum.

Pada kegiatan tersebut perempuan dilatih untuk berdiskusi dengan dibentuk kelompok. Hal ini diutarakan oleh Ketua Puspita Bahari pada penulis berikut ini:

“Keputusan tidak masing-masing, ada usul pendapat. Secara musyawarah mufakat kalau memang ada usulan ini usul ini kita cari titik temu satu yang bisa ditempuh untuk diambil, dari situ kan saling bernegosiasi.” Di sekolah pelopor keadilan itu ada diskusi kelompok, agar mereka belajar berbicara berdiskusi mengambil keputusan”⁶¹

Melalui kegiatan sekolah pelopor keadilan tersebut, selain perempuan memiliki pengetahuan baru dalam bidang hukum maupun keadilan yang tidak kalah penting tentunya berdampak pada keberanian perempuan untuk berbicara atau mengemukakan pendapatnya ketika diluar atau pada lingkup publik. Kemampuan seperti itu dibutuhkan oleh anggota atau perempuan nelayan karena Puspita Bahari memiliki jaringan organisasi baik dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang mengharuskan mereka untuk berbicara, bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan bersama mereka. Seperti pada kegiatan rutin dalam rangka peringatan hari nelayan nasional pada tanggal 6 April 2019 yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Puspita Bahari dan dihadiri perempuan nelayan dari tiga Desa yaitu Morodemak, Purworejo, dan Margolinduk.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jaringan organisasi dari pemerintah meliputi Bidang kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Tim Gubernur Jawa Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Semarang serta dari organisasi non pemerintah yaitu Coalition Anti Trafficking In Women - Asia Pasific.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 20.41 WIB melalui sambungan telepon.

Pada kegiatan diskusi rembuk pesisir dengan tema “Perempuan nelayan bangkit, berdaulat, mandiri, sejahtera” salah satu perempuan nelayan Siti Darwati bercerita bagaimana konfliknya dengan *arat* yaitu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih merajalela dan belakangan ini hingga membuat jaring 30 set hilang tanpa ada yang mengganti. Pada kesempatan perempuan nelayan tersebut meminta ketegasan dari pemerintah dengan adanya peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap illegal supaya tidak ada arat lagi. Apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Darwati tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk mempengaruhi, menegosikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait dengan kebijakannya. Sesuai dengan World Bank bahwa arti pemberdayaan yaitu perluasan atas aset-aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam bernegosiasi dengan cara memengaruhi, mengontrol, serta mengendalikan tanggung jawab pada lembaga yang berpengaruh dihidupnya.

Dengan keterampilan seperti berbicara di depan umum, berinteraksi dengan yang lain dan bernegosiasi dapat membantu individu dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan maupun kepercayaan diri mereka lebih lanjut menurut Zimmerman dan Rapport bahwa keterlibatan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan organisasi dan kegiatan perubahan sosial memiliki efek membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan.

3.1.3 Dimensi *Collective*

Individu bekerjasama untuk mencapai dampak yang lebih luas daripada bekerja secara individu. Tidak hanya mencakup keterlibatan dalam struktur politik, tetapi juga mencakup aksi kolektif berdasarkan kerjasama daripada

kompetisi. Sebagai organisasi berbasis komunitas pada lingkup desa yang memberdayakan perempuan nelayan wilayah pesisir Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Puspita Bahari belum melibatkan diri dalam struktur politik. Tindakan secara kolektif atau bersama-sama dilakukan karena dalam sebuah organisasi tidak dapat mencapai tujuan secara maksimal apabila bekerjanya secara individu, apalagi untuk organisasi berbasis komunitas dengan modal sosial yang masih tinggi dengan didasari pada kepercayaan dan loyalitas antar anggota. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ketua Puspita Bahari, Ibu Masnu'ah

“Kita bergerak bersama. Kalau dalam organisasi begini bekerja secara individu itu mustahil pasti kita bekerja bersama-sama untuk apalagi untuk mencapai dampak yang luas. Gerak bareng untuk perubahan status di KTP dari ibu rumah tangga menjadi nelayan dengan Desa Purworejo”⁶²

Untuk mencapai dampak luas dari kerjasama antar perempuan nelayan dilakukan pada aksi untuk perubahan status pekerjaan di KTP dari ibu rumah tangga menjadi nelayan agar mendapatkan kartu asuransi nelayan seperti yang didapatkan oleh laki-laki karena profesi nelayan yang digeluti oleh perempuan anggota Puspita Bahari ini memiliki resiko yang tinggi sehingga kartu asuransi nelayan sangat dibutuhkan mereka untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ketika melaut.

Dari Desa Morodemak terdapat 2 perempuan nelayan dan bersama-sama melakukan perjuangan dengan 31 perempuan di Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo. Tidak mudah bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan perubahan status di KTP dengan melalui proses panjang karena terhambat pada

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 20.41 WIB melalui sambungan telepon

permasalahan gender pada profesi nelayan yang tidak umum di mata masyarakat. Dengan aksi secara kolektif yang dilakukan perempuan nelayan pada tanggal 6 April 2019 akhirnya membuahkan hasil dengan adanya kartu asuransi yang saat ini dimiliki oleh perempuan nelayan. Pada bidang ekonomi juga dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) untuk membuat produk olahan dengan ciri khas produk masing-masing anggota. Terdapat 5 KUBE yang dibina oleh Puspita Bahari dimana anggota antar KUBE saling bekerjasama daripada berkompetisi. Hal itu ditunjukkan dengan saling meminjamkan alat produksi diantara anggota KUBE dan berbagai informasi ketika ada pameran. Sesuai yang diungkapkan oleh Nur Hidayah Ketua KUBE Mekar Wangi kepada penulis sebagai berikut:

“Saling meminjamkan alat mbak kan sesama anggota kalau ada yang susah di alat apa KUBE kita punya ya dipinjami. Memberi tahu kalo ada kegiatan, bantu informasi kegiatan dimana jadi biar bisa jualan”⁶³

Hal ini juga dipertegas Ibu Masnu’ah selaku Ketua Puspita Bahari bahwa alat-alat mereka yang punya juga dipinjamkan bagi perempuan yang tidak punya alat. Dengan begitu diharapkan akan memberikan dampak yang lebih pada perempuan nelayan untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Pada dimensi *collective* yang ditandai dengan menekankan pada kerjasama daripada melakukannya secara sendiri pada carakerja organisasi untuk mengembangkan rasa percaya diri, kapasitas individu, menghilangkan perasaan ditindas maupun kemampuan dalam bernegosiasi juga dilakukan oleh Puspita yang bekerja bersama-sama dengan jejaring organisasi agar mencapai dampak atau lingkup sasaran yang lebih luas.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hidayah selaku Ketua KUBE Mekar Wangi pada 19 Januari 2019 Pukul 15.23 WIB di Rumah Informan

Pada pemberdayaan ekonomi diakseskan pada jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Pemerintah Pusat

“Pemberdayaan ekonomi diakseskan lewat keterampilan pelatihan produksi pemasaran, manajemen dan di akseskan peralatan melalui dinas bahkan dikenalkan dengan jaringan luas, kemudian juga pernah ada KUBE dari Kemensos RI tahun 2015”⁶⁴

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas perempuan di Puspita Bahari Diungkapkan oleh Ibu Masnu’ah. Bahwa dilakukan kerjasama dengan LBH APIK Semarang melalui kegiatan sekolah pelopor keadilan. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Nur Kasanah selaku Koordinator Divisi Internal LBH APIK berikut ini:

“Bentuk pendampingan yang dilakukan kita itu seperti kegiatan penyuluhan hukum, tentang hak-hak dasar sebagai warganegara, hak-hak dasar perempuan. Kita juga ada inisiasi program sekolah pelopor keadilan yang juga berpengaruh pada peningkatan kapasitas anggota puspita bahari yang dimulai pada tahun 2016. Konseling juga untuk korban KDRT”⁶⁵

Pada pemberdayaan psikologis yang diperuntukan untuk perempuan korban KDRT, selain dengan LBH APIK Puspita Bahari dikatakan oleh Ibu Isyana selaku Kasubag Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga pernah memberikan dukungannya melalui PPT yaitu Pelayanan Pengaduan Terpadu pada yang ada di Dinsos P2PA dengan pemberdayaan mental untuk korban KDRT seperti memberikan motivasi dan penyuluhan agar saling menguatkan antar satu dengan yang lain.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu’ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Demak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Kasanah selaku Koordinator Divisi Internal LBH APIK Semarang pada tanggal 7 Januari 2019, pukul 10.43 WIB di Kantor LBH APIK Semarang

Selain dengan tujuan untuk memperluas dampak pemberdayaan adanya kemitraan atau kerjasama dengan jejaring organisasi juga didasari karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Puspita Bahari sehingga langkah tersebut sangat membantu carakarya organisasi dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan nelayan

3.2 Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) atau dalam konteks penelitian ini adalah perempuan nelayan, setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai 3 indikator yaitu indikator keluaran, indikator hasil dan indikator dampak.

3.2.1 Indikator Keluaran

Pada indikator ini, ditandai dengan telah diselenggarakannya pemberdayaan terhadap sejumlah perempuan miskin atau wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Pemberdayaan perempuan nelayan yang dilakukan oleh Puspita Bahari dimulai sejak berdirinya organisasi tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2005. Lahir di lingkungan masyarakat yang religius dan masih kental dengan budaya patriarki, Puspita Bahari merupakan wadah bagi perempuan nelayan dalam meningkatkan kemampuan baik secara personal maupun interpersonal untuk dapat terlibat secara aktif pada program pembangunan di lingkungan setempat.

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan nelayan di pesisir morodemak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberdayaan ekonomi, hukum, maupun bidang pendidikan dengan cara memberi informasi, keterampilan, dan pemberian fasilitas. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan

pada perempuan, mendorong kesetaraan gender dan peningkatan ekonomi keluarga nelayan. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Masnu'ah, selaku ketua Puspita Bahari

“Kita memulai itu ya tahun 2005. Pada awalnya itu puspita bahari kan mulai dari 30 istri nelayan yang membentuk puspita bahari dengan tujuan mencerdaskan perempuan, membuka wawasan perempuan dengan harapan perempuan nelayan itu maju dengan berbagai kegiatan yang kita berikan”⁶⁶

Kesadaran masyarakat akan pentingnya masuk dalam sebuah organisasi sangatlah rendah, apalagi ada anggapan dari masyarakat termasuk kaum laki-laki bahwa perempuan yang ikut Puspita Bahari bisa melawan suami karena diajarkan hal-hal yang melawan kodrat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah perempuan nelayan yang diberdayakan atau menjadi anggota Puspita Bahari, hanya ada satu informan yang bergabung sejak awal berdirinya organisasi tersebut, yaitu mbak Zulfa. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti:

“Lupa ya mbak, saya gabung tahun berapa tapi sudah lama. Waktu itu awal banget, sekitar 2006 kayaknya. Saya dulunya enggak tahu ini kelompok apa terus diajak. Orang sini kan yang perempuan kebanyakan nganggur jadi saya diajak ya ikut”⁶⁷

Pentingnya perempuan untuk masuk dalam organisasi karena pada konsep pembangunan berkelanjutan tidak bisa lengkap tanpa adanya keterlibatan perempuan dan program pembangunan yang tidak melibatkan perempuan pun tidak berhasil dalam meningkatkan nasib perempuan itu sendiri.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab.Demak

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Mbak Umi Zulfa selaku Perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.01 WIB di Rumah Informan

Seperti yang dinyatakan oleh komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) berikut ini

“Perempuan di semua tingkatan tanggung jawab selalu terlibat dalam kegiatan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga mereka dan masyarakat”

Melalui organisasi berbasis komunitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan yang dimiliki maupun untuk memenuhi kebutuhan dengan kerjasama antar anggota. Sebagian besar perempuan nelayan yang diberdayakan oleh Puspita Bahari memang diawali karena alasan hanya mengikuti ajakan dari teman, anggota, atau Ketua Puspita Bahari saja.

Seperti halnya dua perempuan yang berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan di laut yaitu Ibu Mujarokah dan Surotun Nadiroh. Sebagai perempuan nelayan di Desa Morodemak yang masih melaut, dua ibu tersebut gabung pada tahun dan dengan alasan yang sama yaitu diajak oleh Ibu Masnu’ah selaku Ketua Puspita Bahari. Begitupun berbagai kegiatan yang diikuti dikarenakan kesamaan profesi dan hanya mereka lah yang masih bertahan sebagai nelayan perempuan.

“Saya itu gabungnya ya bareng ibu mujarokah tahun 2015. Diajak aja karena di desa Morodemak kan yang jadi perempuan nelayan hanya 2 mbak, saya sama ibu mujarokah yang lain itu kan dari desa tambakpolo ada banyak”⁶⁸

Motivasi perempuan nelayan untuk masuk pada organisasi agar diberikan pemberdayaan bukan dari kesadaran individu sendiri melainkan hanyalah karena mengikuti ajakan orang yang menandakan bahwa mereka belum mampu untuk

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Surotun Nadiroh selaku Perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 10.14 WIB di Rumah Informan

menentukan pilihan hidup dan tujuan mereka sendiri. Dengan demikian nantinya setelah melalui proses pemberdayaan dalam organisasi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang diikuti diharapkan mampu membuat dan menetapkan pilihan hidupnya sendiri bukan karena kendali dari orang lain. Pilihan hidup strategis ini dapat terjadi pada berbagai bidang kehidupan. Seperti konsep yang diusung oleh Naila Kabeer bahwa pemberdayaan sebagai proses dimana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat dan menetapkan berbagai pilihan hidup yang strategis seperti pilihan pasangan atau keputusan tentang pendidikan dan pekerjaan.

Namun masih terdapat perempuan nelayan yang mengungkapkan bahwa alasan bergabungnya ialah karena ketertarikannya pada program koperasi simpan pinjam yang diusung oleh Puspita Bahari dan alasan lain seperti menambah pengalaman dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Puspita Bahari. Berbeda lagi dengan Ibu Dayah yang memutuskan bergabung terlebih dahulu daripada mereka yaitu pada tahun 2010 dengan alasan karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami sehingga memutuskan untuk meminta bantuan kepada Puspita Bahari dan ikut bersama dengan perempuan nelayan lain untuk diberikan pemberdayaan. Dapat disimpulkan bahwa sudah diselenggarakannya pemberdayaan perempuan yang dilakukan organisasi Puspita Bahari di Desa Morodemak semenjak berdirinya organisasi tersebut yaitu pada tahun 2005, namun antara satu perempuan dengan yang lainnya memiliki perbedaan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan karena bergantung pada kapan gabungannya perempuan tersebut di Organisasi Puspita Bahari.

3.2.2 Indikator Hasil

Ditandai dengan perempuan miskin atau wanita rawan sosial ekonomi yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan. Pada indikator ini akan dilihat sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi yaitu usaha ekonomi produktif dari perempuan nelayan, karena seperti yang dikemukakan oleh Riat Nugroho salah satu tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Sebelum adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Organisasi Puspita Bahari, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap perempuan nelayan anggota Puspita Bahari sebagian besar mengungkapkan memang belum memiliki usaha ekonomi produktif sebelum ikut dengan Puspita Bahari dikarenakan mayoritas perempuan di Desa Morodemak bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur Hidayah sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Puspita Bahari tidak memiliki usaha ekonomi produktif seperti sekarang ini, namun setelah diberi pemberdayaan Puspita Bahari kini Ibu Nur Hidayah memiliki usaha ekonomi produktif yaitu produk dendeng bahkan menjadi ketua KUBE Mekar Wangi binaan dari Puspita Bahari.

Sama halnya dengan Ibu Nur Hidayah, Mbak Zulfa juga tidak memiliki usaha ekonomi produktif sebelum bergabung dengan Puspita Bahari. Sesudah

diberdayakan dengan Puspita Bahari baru memiliki usaha ekonomi produktif mengolah hasil ikan kelapan menjadi keripik.

Namun karena terkendala ikan yang hanya tersedia pada musim tertentu saja, produksi pun tidak bisa dilakukan setiap hari untuk itu Mbak Zulfa mempunyai usaha dengan berjualan dirumah. Tidak seperti perempuan nelayan lain anggota Puspita Bahari, diakui oleh Ibu Dayah setelah diberikan pemberdayaan pada tahun 2010 beliau mengungkapkan kepada penulis bahwa sebelumnya memang sudah memiliki usaha ekonomi produktif seperti membuat intip dan kerupuk namun semenjak bergabung dengan Puspita Bahari usaha ekonomi produktif menjadi bertambah variasi produknya. Berikut penuturan Ibu Dayah kepada penulis:

“Dulu saya punya usaha intip sama kerupuk. Sekarang saya bisa bikin apa saja kerupuk dari nasi, kerupuk dari ikan laut yang murah saya beli yang sampe dibuang-buang. 1 ikan bisa dibuat 3 produk kerupuk ikan, tahu bakso ikan terus intip, peyek udang sama menerima pesanan roti.”⁶⁹

Penambahan usaha ekonomi tersebut tentunya berdasar pada keterampilan dan minat yang dimiliki oleh Ibu Dayah dan didukung dengan pemberian fasilitas melalui berbagai kegiatan pelatihan usaha yang diikuti selama menjadi anggota Puspita Bahari. Dari penambahan usaha ekonomi maka diikuti juga pada penambahan pendapatan keluarga yang pada akhirnya membuat perempuan mandiri secara ekonomi dengan tidak hanya bergantung pada suami saja.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dayah selaku Perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 13.24 WIB di Kantor Sekretariat Puspita Bahari Desa Morodemak

Gambar 3.1
Proses Produksi Usaha Ekonomi Produktif Ibu Dayah



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kondisi berbeda justru dialami 2 perempuan nelayan di Desa Morodemak yang masih bertahan untuk mencari ikan dilaut yaitu Ibu Surotun dan Mujarokah. Seperti yang sudah penulis paparkan diatas kedua perempuan yang bergabung sejak tahun 2015 tersebut belum mempunyai usaha ekonomi produktif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, mereka tidak memiliki usaha ekonomi produktif baik sebelum maupun sesudah adanya pemberdayaan yang diterima dikarenakan hanya fokus pada profesinya sebagai perempuan nelayan yang mencari ikan dilaut untuk membantu suaminya. Hasil tangkapan merupakan ikan segar yang langsung dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak. Dengan menjadi nelayan yang membantu suami mencari ikan dilaut karena tidak memiliki anak buah kapal saja sudah menyita waktu dari kedua perempuan nelayan tersebut belum lagi ditambah dengan urusan domestik yang harus dikerjakan sendiri karena masih kuatnya patriarki di desa pesisir ini. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Surotun Nadhiroh:

“Saya nelayan yang membantu suami cari ikan dilaut mbak jadi engga ngolah ikan. Berangkatnya jam 3 pagi atau jam 2 gitu terus baliknya kalo dapat ikannya langsung dijual”⁷⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan profesi bisa mempengaruhi berhasil atau tidaknya perempuan tersebut yang diukur pada indikator hasil. Pada indikator hasil yang ditandai dengan perempuan yang diberdayakan telah mampu berusaha ekonomi produktif sesuai keterampilan mereka sudah dilalui oleh perempuan nelayan pengolah hasil tangkapan ikan, namun pada perempuan nelayan yang mencari ikan dilaut tidak memiliki usaha ekonomi produktif, karena hanya fokus pada pekerjaan sebagai nelayan saja dan kegiatan pemberdayaan yang diikuti juga pada perjuangan mereka sebagai perempuan nelayan yang melaut bersama dengan perempuan nelayan di Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3.2.3 Indikator Dampak

Ditandai dengan perempuan miskin atau wanita rawan sosial ekonomi, dalam konteks penelitian ini adalah perempuan nelayan yang diberdayakan telah mampu mengembangkan usaha, berorganisasi/bermasyarakat dan membantu perempuan lain yang masih miskin.

Aspek pengembangan usaha pada indikator dampak dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas pengembangan dan kesempatan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal serta meningkatkan pendapatan yang didorong dengan pemberian bantuan, pelatihan keterampilan usaha dan pelatihan pemasaran

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Surotun Nadiroh selaku Perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 10.14 WIB di Rumah Informan

produk yang dibutuhkan oleh perempuan nelayan agar dapat mengembangkan usahanya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Masnu'ah sebagai berikut:

“Ada pendampingan pelatihan, diberi peralatan pemasarannya juga kemudian kalo dari Dinas Kesehatan itu ada untuk ijin Produk Industri Rumah Tangga (PRIT)”⁷¹

Upaya pengembangan usaha ekonomi produktif kepada perempuan nelayan berusaha dipenuhi Puspita bahari dengan memanfaatkan jaringan organisasi yang sudah ada untuk memfasilitasi berbagai kegiatan maupun pemberian bantuan yang dibutuhkan oleh mereka. Hal ini diakui oleh Ibu Endang Ermawati yang mendapatkan bantuan berbagai alat seperti alat irisan kerupuk, kulkas, tempat penyimpanan kerupuk, blender, dan dandang serta banyaknya pelatihan yang diikuti untuk membuat usaha ekonomi produktif. Tak jauh berbeda dengan Ibu Endang, Ibu Dayah yang memiliki berbagai bentuk olahan produk dengan memanfaatkan potensi lokal daerah pesisir juga mengatakan sebagai berikut:

“Tidak hanya bimbingan, pelatihan, pendampingan termasuk alat-alat juga diberi. Saya memasarkan sendiri, kalau puspita bahari dapat undangan dari kota kota jadi saya pasarkan sekalian pada pameran di Jakarta, Semarang misalnya. Kalau dititipkan diwarung-warung sekitar aja sudah cepet habisnya”⁷²

Dari bekal yang diperoleh perempuan nelayan seperti pelatihan pengolahan produk, bantuan peralatan maupun cara memasarkan produk usaha ekonomi produktif digunakan mereka untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab.Demak

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Dayah selaku Perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 13.24 WIB di Kantor Sekretariat Puspita Bahari Desa Morodemak

Namun diakui oleh Ibu Endang masih kesulitan mengembangkan produk usahanya karena keterbatasan pasar dan banyaknya usaha seperti yang ditekuni ibu tersebut yaitu membuat kerupuk. Berikut yang diungkapkan Ibu Endang kepada penulis:

“Kalau saya masih susah mengembangkan mbak, karena produk kerupuk disini banyak sekali yang buat tapi pasarnya itu yang susah. Belum dapat pengepul yang pasti, jadi kalau mau bikin yang banyak kan tidak bisa takut tidak laku. Dipasarkannya masih dilingkungan Morodemak padahal kan saya juga pingin produksinya banyak”⁷³

Minimnya pengetahuan untuk memasarkan produk secara luas dengan mengikuti trend yang berkembang saat ini memang menjadi kendala sejak awal selain tingginya harga jual profuk yang berakibat kurang diminati pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Lain halnya dengan Ibu Dayah, kendala yang dihadapi tidak berarti karena sebelum ikut dengan Puspita Bahari sudah mempunyai usaha ekonomi produktif. Seperti yang sudah dipaparkan diatas dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan organisasi ini mampu mengembangkan usahanya karena produk olahannya semakin banyak dan pemasarannya juga tidak hanya dilingkup Desa Morodemak.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan perempuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dipengaruhi oleh dukungan organisasi Puspita Bahari itu sendiri dan jaringnya dengan memberikan fasilitas untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif perempuan melalui berbagai kegiatan dan pemberian bantuan alat produksi yang dibutuhkan perempuan.

⁷³ Hasil wawancara dengan Endang Ermawati selaku perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 12.45 WIB di Rumah Informan

Pada aspek kemampuan perempuan untuk berorganisasi /bermasyarakat setelah melalui berbagai upaya pemberdayaan, para perempuan nelayan yang tergabung di Puspita Bahari berdsarkan penuturan Ibu Masnu'ah dan para perempuan nelayan kepada penulis bahwa seluruhnya juga beroganisasi di Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) wilayah Jawa Tengah Kabupaten Demak. Perempuan nelayan anggota Puspita Bahari selain ikut dalam organisasi PPNI juga mengembangkan diri mereka dengan mayoritas ikut organisasi lain seperti halnya organisasi berbasis agama seperti Muslimat NU maupun Majelis Taklim di lingkungan Desa Morodemak. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ikut PPNI saja mbak, tapi tahun ini saya mau coba ikut Muslimat NU mbak. Kalau perkumpulan yang perempuan yasinan (Majlis Taklim) saya sudah ikut dari dulu”⁷⁴

Perempuan nelayan setelah diberikan pemberdayaan mampu berorganisasi sesuai dengan profesi mereka dan sesuai pada ketertarikan perempuan nelayan yang mayoritas berorganisasi perempuan berbasis agama. Hal ini dilihat dari organisasi yang diikuti yaitu Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Jawa Tengah wilayah Kabupaten Demak dan Muslimat NU maupun Majelis Taklim. Artinya perempuan nelayan mampu menetapkan pilihan hidupnya sendiri yaitu memutuskan pilihan organisasi yang diikuti sesuai dengan minat mereka dan tidak adanya control dari orang lain atas pilihan hidup strategis tersebut. Bergabungnya perempuan dengan lebih dari satu organisasi tentunya dapat menambah pengalaman mereka dari fokus kerja yang berbeda-beda disetiap

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Endang Ermawati selaku perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 12.45 WIB di Rumah Informan

organisasi yang diikuti dan merupakan point utama yang membawa mereka terhubung dengan masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.

Aspek terakhir pada indikator dampak yaitu perempuan yang sudah diberikan pemberdayaan membantu perempuan lain yang masih miskin. Berdasarkan definisi yang diberikan Griffin pemberdayaan perempuan yaitu ketika perempuan mampu memberikan kontribusi di lapisan masyarakat dan tidak hanya di rumah. Kontribusi di semua lapisan masyarakat salah satunya dilakukan dengan membantu perempuan lain yang belum dapat dikatakan pada posisi berdaya. Wujud partisipasi untuk membantu perempuan lain ditunjukkan perempuan nelayan yang ada di Organisasi Puspita Bahari paling sederhana dimulai dengan saling meminjamkan alat produksi usaha yang mereka punya kepada perempuan lain yang belum memiliki alat agar dapat melakukan produksi usaha ekonomi produktif agar berdampak pada peningkatan pendapatan perempuan tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa saling percaya yang tinggi diantara perempuan nelayan. Hal ini tidak terlepas dari Organisasi Puspita Bahari yang membentuk modal sosial sejak perempuan bergabung dalam organisasi yaitu didasari kepercayaan yang tinggi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada.

Selain membantu dalam hal meminjamkan alat untuk produksi usaha, dan hal kecil seperti berbagi informasi ketika kegiatan, perempuan nelayan juga membantu perempuan lain ketika ada yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Koordinasi saling dilakukan antara satu perempuan dengan yang lain untuk mendampingi perempuan yang terkena KDRT tersebut.

Perempuan yang ada di Puspita Bahari ketika mendengar atau melihat korban KDRT dilingkungan mereka secara langsung akan memberikan tindakan dengan memberi tahu pada perempuan lain yang sering menangani kasus KDRT yaitu Ibu Dayah, setelah menjadi korban KDRT dan dibantu oleh Puspita Bahari dalam penanganan kasusnya kini Ibu Dayah selain bisa keluar dari masalah yang dialaminya dahulu juga bisa membantu perempuan lain yang mengalami nasib serupa. Kondisi lain dialami oleh Ibu Endang yang justru tidak berani membantu perempuan lain yang terkena KDRT dengan alasan ketakutan atas stigma masyarakat yang dianggap mencampuri urusan orang lain. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Endang:

“Kalau membantu yang terkena KDRT saya belum berani karena masyarakat sini ya nganggepnya bukan urusanmu ya paling saling membantu pinjam alat aja mbak”⁷⁵

Partisipasi perempuan nelayan anggota Puspita Bahari untuk membantu perempuan lain yang dapat dikatakan belum berdaya berbeda-beda tergantung pada kemampuan mereka masing-masing dalam hal apa untuk bisa membantu perempuan lain. Dampak dari pemberdayaan yang dirasa oleh perempuan tidak hanya oleh dirinya sendiri tetapi mampu memberikan pengaruh terhadap perempuan lain maupun pada semua lapisan masyarakat salah satunya melalui berorganisasi dan hal tersebut sudah dicapai oleh perempuan nelayan yang dipaparkan diatas.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Endang Ermawati selaku perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 19 Januari 2019, pukul 12.45 WIB di Rumah Informan

3.3 Keberlanjutan Puspita Bahari sebagai Organisasi Berbasis Komunitas dalam pemberdayaan perempuan nelayan

3.3.1 Internal Organisasi Puspita Bahari

Seperti yang dikemukakan Speer dan Hughey, upaya pengorganisasian lebih kuat dan berkelanjutan dari waktu ke waktu ketika mereka melibatkan orang-orang dengan ikatan interpersonal yang mapan dan nilai-nilai bersama dalam masyarakat daripada hanya melibatkan dukungan individu atau golongan posisi terhadap inisiatif publik.

Begitupula dengan Puspita Bahari, upaya keberlanjutan organisasi dilakukan dengan melibatkan anggota dari organisasi dengan melalui kaderisasi pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Adanya proses kaderisasi tersebut dimaksudkan agar kader-kader bisa terus melanjutkan program atau kegiatan organisasi, karena tidak selamanya ketua organisasi yang terus bergerak atau menjadi inisiator untuk keberlangsungan organisasi di masa depan. Kutipan wawancara dengan ibu Masnu'ah

“Kaderisasi ya terkait dengan kegiatan di Puspita Bahari semuanya punya hak untuk belajar bareng bareng. Harapannya dari kaderisasi itu kan agar bisa melanjutkan tapi nanti ditengah jalan bagaimana yang terpenting kami memperbaiki terus”⁷⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Paul, Niehoff, dan Turnley karakteristik pemimpin mendorong pemberdayaan dalam organisasi yaitu menyampaikan karisma, menawarkan motivasi inspiratif, dan membantu anggota staf mencapai

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 20.41 WIB melalui sambungan telepon

tujuan yang penting bagi mereka, hal tersebut dilakukan oleh Ibu Masnuah selaku ketua Puspita Bahari terhadap para perempuan nelayan.

Wujud nyata dari Puspita Bahari untuk terus melakukan perbaikan demi tercapainya keberlanjutan organisasi yaitu dengan merekrut kader muda seperti Mbak Naning. Perempuan yang berasal dari Desa Purworejo tersebut menginisiasi adanya program sekolah sadar sosial atau yang disingkat dengan S3 untuk anak-anak nelayan setempat yang merupakan keberlanjutan dari kegiatan sekolah pelopor keadilan yang saat ini sedang vakum. Peneliti mengikuti kegiatan S3 yang dilaksanakan satu bulan dua kali pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Sekretariat Puspita Bahari Desa Morodemak. Pada minggu tersebut tema yang diajarkan yaitu mengenai pengolahan limbah plastik. Hadir salah satu aktivis lingkungan Kabupaten Demak Ibu Sri yang memberikan pembelajaran pada anak-anak nelayan dengan mempraktikkan bagaimana cara mengolah limbah plastik menjadi berbagai bentuk kerajinan seperti tas, dompet, bantal, hiasan rumah dan ecobrick yang akan dibuat untuk meja belajar pada kegiatan S3 nantinya.

Pada kesempatan tersebut juga ada Ibu Masnuah selaku ketua Puspita Bahari yang turut serta mendukung anak-anak nelayan untuk mengikuti kegiatan sekolah sadar sosial dengan penuh semangat. Tak hanya itu tim dari Narasi TV juga turut hadir untuk melakukan liputan kegiatan sekolah sadar sosial yang menambah tingginya antusias anak-anak dengan mengikuti tahapan bagaimana limbah plastik dimanfaatkan sebagai kerajinan yang bermanfaat untuk mereka.

Gambar 3.2
Kegiatan Sekolah Sadar Sosial



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kader muda lain di Puspita Bahari yaitu Mbak Dewi. Sebagai perempuan yang pernah menjadi korban KDRT, kini perempuan tersebut menjadi koordinator untuk perempuan nelayan yang ada di Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo. Adanya koordinator disetiap desa dimana perempuan nelayan itu diberdayakan merupakan bagaian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan organisasi Puspita Bahari agar dapat terus melakukan pemberdayaan pada perempuan nelayan. Adanya koordinator pada TriDesa wilayah pemberdayaan yaitu Desa Morodemak Ibu Umi, Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo Mbak Dewi dan Desa Margolinduk Ibu Hidayah. Koordinator ini berfungsi untuk memberikan arahan informasi bagi perempuan nelayan ketika ada kegiatan Puspita Bahari.

Pada diri seorang kader seharusnya memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi pada organisasi tersebut, karena dalam sebuah organisasi ada dinamika yang dilalui. Namun karena sifat anggota organisasi yang

tidak mengikat atau bersifat sukarelawan jadi tidak bisa memaksa perempuan nelayan. Kutipan wawancara dengan Ketua Puspita Bahari, Ibu Masnuah

“Sampai saat ini bisa mempertahankan tapi ya namanya organisasi pasang surut itu kan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Organisasi masyarakat lancar itu engga bisa mbak.terpenting sudah menjelaskan hak dan kewajibannya walaupun pada brojol sendiri-sendiri”.⁷⁷

Keterlibatan suami pada kenyataannya merupakan faktor penentu bagi ruang gerak perempuan dalam organisasi untuk terus berkomitmen menciptakan organisasi yang berkelanjutan apabila ada dukungan dari suami dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kiprah organisasi apabila suami tidak memberikan izin. Hal ini dikarenakan dari pihak suami sendiri juga mempunyai karakter ingin dilayani segala sesuatunya, terutama ketika suami ‘miyang’ yaitu sebutan dari orang pesisir Bonang ketika hendak melaut. Masyarakat di daerah pesisir Morodemak, khususnya perempuan memang sangat mengutamakan kepentingan keluarga untuk mengurus anak dan suami daripada terlibat secara aktif pada suatu organisasi tertentu dengan alasan tidak mau mengorbankan rumah tangganya hanya demi aktif dalam organisasi. Asumsi ini muncul karena masyarakat melihat contoh pada lingkungan sekitar.

Pada perempuan nelayan yang masih aktif di Organisasi Puspita Bahari, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa perempuan nelayan mayoritas dari pihak suami mendukung dengan ikutnya istri mereka di Puspita Bahari dan mengizinkan untuk ikut kegiatan Puspita Bahari dengan catatan tidak boleh keluar dari lingkup Desa.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu’ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 20.41 WIB melalui sambungan telepon

Seperti salah satunya yang diutarakan oleh Ibu Mujarokah berikut ini

*“Kalau saya didukung suami buat ikut Puspita Bahari tapi hanya kegiatan yang dekat saja mbak. Kegiatan dengan perempuan nelayan di sebelah (Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo)”*⁷⁸

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya keberlanjutan organisasi yang dilakukan oleh Puspita Bahari melalui kaderisasi pada anggotanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dukungan keluarga khususnya suami mereka berbeda lagi dengan kader muda atau yang belum menikah dan yang berstatus tidak memiliki suami lagi atau *single parent* tidak mengalami kendala dalam dukungan keluarga.

3.3.2 Eksternal Organisasi Puspita Bahari

Speer dan Hughey mengatakan organisasi berbasis komunitas harus terlibat dalam upaya penjangkauan yang bersifat *multi level*, merekrut penerima layanan yang baru, dan membangun hubungan yang kuat dengan jaringan informal, organisasi lokal, maupun dengan lembaga yang dapat meningkatkan layanan. Langkah tersebut merupakan upaya untuk keberlanjutan organisasi.

3.3.2.1 Membangun hubungan kuat dengan Jaringan Informal

Membangun hubungan yang kuat dengan jaringan informal dapat diartikan membangun hubungan dengan masyarakat dimana organisasi tersebut bekerja yang berpengaruh pada keberlanjutan organisasi dalam melakukan pemberdayaan perempuan karena berkaitan dengan peningkatan layanan dalam organisasi. Cara yang dilakukan oleh Puspita Bahari untuk membangun hubungan dengan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Mujarokah selaku perempuan nelayan di Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 11.20 WIB di Rumah Informan.

masyarakat sekitar yaitu melalui pengenalan dengan berbagai media yang digunakan.

Berikut ini kutipan wawancara dengan Ketua Puspita Bahari

“Lewat pendidikan penyadaran hak, sosialisasi, lewat penyaluran bantuan sosial dan bantuan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Kami juga sudah pernah masuk di Fatayat, Muslimat NU dan PKK namun tidak berpengaruh.”⁷⁹

Namun dalam upaya membangun hubungan dengan masyarakat/ pengenalan organisasi tersebut tidak bisa diterima semua masyarakat dilingkungan Desa Morodemak dengan adanya Puspita Bahari. Penerimaan masyarakat untuk organisasi baru yang hadir dalam lingkungannya memanglah tidak mudah, dengan latar belakang pendidikan penduduk mayoritas mengenyam pendidikan SD dengan pemikiran yang belum terbuka dan kondisi geografis terletak di wilayah pesisir dengan ciri masyarakat yang *'keras'* menjadi faktor penentu penerimaan di masyarakat. Tentunya terdapat pro dan kontra dalam menerima organisasi ini. Pihak yang pro menerima dengan positif adanya Puspita Bahari sebagai organisasi yang dapat menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan. Pada pihak yang kontra tidak menerima dengan positif kehadiran Puspita Bahari karena dianggap sebagai organisasi yang mengajarkan perempuan untuk tidak patuh dengan laki-laki.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab.Demak

Seperti halnya kutipan wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari:

“Dengan begitu saja tidak mendapat pandangan positif dari semua masyarakat mbak. Dari awal organisasi puspita bahari dianggap melawan kodrat dan berani. Berani melindungi dari memperjuangkan haknya namun yang dianggap masyarakat itu yang menentang laki-laki”.⁸⁰

Sejak kehadiran Organisasi Puspita Bahari yang dibentuk oleh 30 perempuan nelayan memang menemui hambatan dalam penerimaan di lingkungan masyarakat setempat. Mayoritas informan cenderung mempunyai sikap acuh atau tidak peduli dengan tidak mau mencampuri urusan yang dilakukan oleh Puspita Bahari karena ada atau tidak adanya organisasi tersebut kondisi mereka sama saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis munculnya sikap seperti itu karena adanya kecemburuan sosial yang dialami oleh masyarakat sekitar karena mereka tidak mendapat berbagai bentuk bantuan dari Puspita Bahari. Bentuk bantuan yang dimaksud yaitu bantuan sosial berupa bantuan modal usaha, peralatan maupun sembako yang diakseskan Puspita Bahari dari jaringan organisasi tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis dengan 3 perempuan nelayan non anggota sebelah kantor Puspita Bahari

“Bantuannya banyak ya kita tidak pernah dapat yang dapat ya mereka-mereka aja mbak anggotanya. Kalau ulang tahunnya Puspita Bahari ya tetangganya dikasih undangan gitu aja mbak”.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab.Demak

⁸¹ Hasil wawancara dengan Informan D selaku non anggota Puspita Bahari di Desa Morodemak pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 16.26 WIB di rumah informan

Seperti yang diketahui, masyarakat yang bisa mengakses berbagai bentuk bantuan maupun kegiatan adalah yang bergabung atau yang diberdayakan Puspita Bahari. Namun menurut penuturan Ibu Masnuah masyarakat juga bisa mendapat akses bantuan jika memenuhi persyaratan sesuai yang sudah ditentukan dari jaringan tersebut. Seperti yang sudah pernah dilakukan yaitu pada tahun 2015 KUBE dari Kemensos RI untuk kelompok tidak hanya dari Puspita Bahari melainkan masyarakat umum juga. Masyarakat sekitar memang menghendaki agar mendapat bantuan seperti halnya perempuan nelayan yang bergabung di Puspita Bahari namun disatu sisi mereka tidak ingin ikut kegiatan pemberdayaan organisasi tersebut. Hal seperti ini sudah menjadi sesuatu yang wajar di lingkungan masyarakat pedesaan, pola pikir masyarakat melihatnya dari ukuran material saja, maka tidak heran jika dalam proses pengenalan Puspita Bahari media yang pernah digunakan melalui pemberian bantuan sosial. Organisasi ini ingin memberikan pemahaman yang berbeda kepada masyarakat bahwa bekal dari berorganisasi atau ikut perkumpulan itu tidak hanya material saja namun juga ilmu maupun pengalaman.

Puspita Bahari tidak membangun hubungan kuat dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ada di Desa Morodemak. Sebagai tokoh agama Bapak Munajat sangat menyayangkan karena Puspita Bahari tidak melibatkan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat sejak awal berdirinya organisasi tersebut hingga sekarang. Pandangan dari tokoh agama sendiri tidak mempermasalahkan jika ada Puspita Bahari selama tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berikut kutipan wawancaranya

“Tidak pernah dilibatkan sama sekali seharusnya kan dilibatkan sehingga bisa membantu memberi informasi Postifnya dulu yang tidak punya kegiatan ya jadi ada kegiatan. Selama itu tidak bertentangan dengan agama ya tidak masalah”⁸²

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Puspita Bahari bersifat postif karena pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan melalui kegiatan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut eksistensi kegiatan yang dilakukan Puspita Bahari harus terus berlanjut. Dari masyarakat sekitar atau perempuan non anggota Puspita Bahari yang ditemui penulis, beberapa mengatakan bahwa eksistensi organisasi Puspita Bahari di lingkungan mereka kurang aktif lagi atau tidak seperti dulu dengan banyak kegiatan yang dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang dulu pernah menjadi anggota Puspita Bahari sebagai berikut

“Sekarang kayaknya jarang ya mbak, kemarin saya lihatnya ramai acara ulang tahun Puspita Bahari, tapi kampung sini banyak yang masih ikut. Dulu ya bagus mbak lancar kompak, tapi ya itu kendala orang sini kan lebih penting ngurusi keluarga daripada ikut kaya begitu”⁸³

Namun menurut tiga perempuan disebelah Sekretariat Puspita Bahari yang ditemui penulis menuturkan ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kantor tersebut. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kemarin itu banyak yang kesini mbak ramai ada turis-turis dari Australia satu bus sama Undip juga. Kegiatannya sama anak-anak kalau engga salah. Terus juga acara ulang tahun Puspita Bahari ada dapat bantuan dari BAZNAZ.”⁸⁴

⁸² Ibid. Hasil wawancara dengan Bapak Munajat

⁸³ Hasil wawancara dengan Informan B selaku non anggota Puspita Bahari di Desa Morodemak pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 16.26 WIB di rumah informan.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Informan C selaku non anggota Puspita Bahari di Desa Morodemak pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 15.50 WIB di rumah informan

Intensitas kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Puspita Bahari memang tidak aktif seperti dahulu dengan berbagai kegiatan pemberdayaan misalnya pelatihan pengolahan produk. Hal ini juga diakui oleh beberapa anggota aktif Puspita Bahari yang diwawancarai oleh penulis. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa tidak intensnya kegiatan pemberdayaan utamanya dalam ekonomi dikarenakan perempuan yang diberdayakan melalui kegiatan ekonomi dapat dikatakan sudah berhasil dengan memiliki usaha ekonomi produktif sendiri sehingga tidak diperlukan kegiatan seperti itu lagi. Tidak intensnya kegiatan juga dipengaruhi oleh jejaring organisasi khususnya pemerintah karena kegiatan seperti itu diaksakan Puspita Bahari melalui Pemerintah daerah sedangkan dari pemerintah juga memiliki keterbatasan dana dan memiliki kelompok usaha lain yang juga harus diberi bantuan.

3.3.2.2 Membangun hubungan kuat dengan Jaringan/Organisasi Lokal

Organisasi berbasis komunitas harus terlibat dalam upaya membangun hubungan yang kuat dengan jaringan informal, organisasi lokal maupun lembaga yang dapat meningkatkan layanan. Jejaring organisasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Yi-Yi Chen mengenai hubungan antara jaringan dan kinerja CBO dari perspektif analisis jejaring sosial dengan mengambil sampel 15 CBO di Taiwan mengacu pada hubungan kolaborasi aktif di antara organisasi untuk tujuan perbaikan layanan. Hal serupa juga dilakukan Puspita Bahari agar keberlanjutan organisasi tetap terjaga dengan perbaikan layanan untuk perempuan nelayan.

Sejak dibentuk pada tahun 2005, Puspita Bahari sudah mulai berupaya membangun jaringan dengan beberapa pihak. Jaringan tersebut mencakup instansi pemerintahan daerah atau pusat maupun dengan organisasi non pemerintah. Jejaring organisasi Puspita Bahari dalam lingkup lokal dimulai pada tahun 2006 yang menandakan bahwa organisasi tersebut memiliki strategi yang baik dalam pola jejaring untuk membangun kemitraan dengan lembaga lain karena dengan umur 1 tahun setelah berdirinya organisasi sudah bisa memiliki jaringan dengan cepat dan bertambah pada tahun selanjutnya.

“Puspita Bahari sudah punya jejaring dan bermitra dimulai pada tahun 2006 bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani Nelayan (LPUBTN) Semarang. Pada tahun 2007 kita masuk paralegal dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, kemudian tahun 2008 juga bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Indonesia (LBH APIK) Semarang. Dengan pemerintah daerah dimulai pada tahun 2011 seperti dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, juga dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”⁸⁵

Selain jaringan tingkat lokal, organisasi Puspita Bahari membangun hubungan dengan jaringan tingkat nasional yaitu pada tahun 2010, Puspita Bahari mulai mengenal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.

KIARA merupakan organisasi non-pemerintah yang berkomitmen untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah. Dari hal itu, Puspita Bahari kemudian dikenal sebagai

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Demak

organisasi yang melakukan gerakan-gerakan secara positif pada permasalahan ditingkat bawah yang dialami oleh masyarakat pesisir.

“Pada tahun 2010 didampingi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan ditahun itu juga Puspita Bahari menjadi percontohan inisiasi wadah Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI). Dari berbagai jaringan tersebut kemudian banyak yang mengetahui gerakan-gerakan Puspita Bahari akhirnya membuat banyak media yang silih berganti datang”⁸⁶

Jaringan pada tingkat yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah jaringan bersifat nasional berakibat tinggi juga pada eksistensi organisasi di luar wilayah kerja organisasi. Upaya membangun hubungan dengan jaringan yang dilakukan oleh Puspita Bahari dengan berbagai pihak untuk dapat memperoleh dukungan dan bermitra dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan cara informal. Pengenalan dari satu individu ke individu lain maupun dari satu lembaga yang sudah menjadi mitra merekomendasikan kepada lembaga lain yang berpotensi menjadi bagian dari jejaring organisasi berbasis masyarakat ini. Selain melalui pihak lain, Puspita Bahari juga mencari jaringan sendiri dalam mengakses kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.

Dari hasil wawancara Ketua Puspita Bahari menuturkan sebagai berikut:

“Kita saling mengenalkan satu sama lain mbak, awalnya kita dikenalkan mbak bibik (salah satu pengacara yang ikut membantu berdirinya Puspita Bahari) kepada LBH Semarang kemudian LBH Semarang mengenalkan ke KIARA karena mereka (LBH Semarang) itu anggota KIARA di Jawa Tengah. Kami juga mencari jaringan sendiri untuk mengakses kegiatan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Demak

*yang dibutuhkan komunitas dengan ikut rapat menyampaikan masalah ini, program apa yang bisa kita akses”.*⁸⁷

Inisiator atau yang memprakarsai dalam membangun hubungan bergantung dengan jejaring. Salah satu lembaga bantuan hukum yang bermitra dengan Puspita Bahari yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau lebih dikenal dengan sebutan LBH APIK. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masnuah maupun dengan koordinator divisi Internal LBH APIK, inisiator dalam kemitraan mengalir begitu saja karena pada awalnya dipertemukan pada suatu program wilayah pesisir Kabupaten Demak. Selanjutnya, yang menginisiasi beberapa kegiatan pemberdayaan ada dari LBH APIK maupun dari Puspita Bahari terlebih dahulu.

*“Awalnya ketika ada program wilayah pesisir Demak, di wilayah sana kan patriarkinya masih tinggi sama kekerasannya juga jadi ketemu dengan Puspita Bahari. Setelah itu pada tahun 2016 LBH APIK menginisiasi program sekolah pelopor keadilan yang kemudian diteruskan oleh Puspita Bahari. Ada program murni inisiasi dari puspita bahari seperti sekolah sadar sosial untuk anak nelayan, ya kita mendukung dengan membantu apa yang mereka butuhkan”.*⁸⁸

Berbeda dengan LBH APIK, pada kemitraan dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak yang menjadi inisiator ialah Organisasi Puspita Bahari dengan mengajukan apa saja yang dibutuhkan oleh komunitas dan bisa dilakukan bersama dengan dinas tersebut.

⁸⁷ Ibid. Hasil wawancara dengan Ibu Masnu'ah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Kasanah selaku Koordinator Divisi Internal LBH APIK Semarang pada tanggal 7 Januari 2019, pukul 10.43 WIB di Kantor LBH APIK Semarang

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Isyana selaku Kepala Sub Bagian Program Dinsos P2PA Kabupaten Demak kepada penulis berikut ini:

*“Inisiatornya Puspita Bahari dahulu, kemudian kita menanggapi lalu kita beri sekiranya yang bisa dinas bantu itu apa saja. Mereka kan mengajukan apa-apanya”.*⁸⁹

Pernyataan yang serupa juga diberikan oleh ketua Organisasi Puspita Bahari, Ibu Masnu’ah

*“Dengan pemerintah daerah kami mendekat, merapat dan menyampaikan misalnya dengan Dinsos P2PA, kami mempunyai data yang membutuhkan usaha ekonomi produktif, kami punya data korban kekerasan ada program apa dari dinsos untuk Ini”*⁹⁰

Lain halnya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pada pelaksanaan kemitraan dengan Puspita Bahari inisiator kegiatan bergantung pada situasi dan kondisi dan porsi kegiatan. Adanya organisasi berbasis masyarakat merupakan respon dari kurangnya kinerja oleh banyak pemerintah dalam memenuhi sosial ekonomi warga. OBK di sebagian besar negara berkembang baik ditingkat nasional, regional dan lokal banyak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, sosial dan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ibu Isyana Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak pada tanggal 09 Januari 2019, pukul 09.34 WIB di Kantor Dinsos P2PA Kab. Demak

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Masnu’ah selaku Ketua Organisasi Puspita Bahari pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab.Demak

Namun, hal ini juga menguntungkan untuk organisasi berbasis masyarakat karena dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan adanya penerimaan yang baik dari pemerintah daerah tujuan organisasi akan mudah tercapai. Tidak seperti pada penerimaan yang terjadi di masyarakat setempat dukungan dari jejaring organisasi kepada Puspita Bahari dikatakan baik. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Isyana selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak yang menjalin mitra dengan Puspita Bahari sejak tahun 2015. Berikut ini kutipan wawancara dengan Ibu Isyana:

“Bagus, karena membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena memang kalau tidak ada kelompok seperti organisasi Puspita Bahari ini kita juga kesulitan untuk sampai pada akar masalah yang ada di masyarakat. Dengan adanya Puspita Bahari bisa mempermudah dengan menjadi pendamping untuk masyarakat atau perempuan di pesisir sana mabak karena rata-rata ekonomi nelayan rendah”⁹¹

Tidak jauh berbeda, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak juga menerima dengan positif adanya organisasi Puspita Bahari. Sesuai pernyataan Pak Kusdamarwan selaku Kepala Bidang Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berikut ini:

“Satu hal yang positif ibaratnya orang pesisir dengan SDM relatif rendah dengan penggerak seperti itu kan lebih sangat dibutuhkan sehingga perempuan pesisir kan lebih berdaya”⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Isyana Kepala Sub Bagian Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak pada tanggal 09 Januari 2019, pukul 09.34 WIB di Kantor Dinsos P2PA Kab. Demak

⁹² Hasil wawancara dengan Pak Kusdamarwan selaku Kepala Bidang Industri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Demak pada tanggal 09 Januari 2019, pukul 10.48 WIB di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Demak

Berdasarkan pernyataan dari kedua Instansi pemerintah daerah Kabupaten Demak tersebut, tidak mengherankan jika mereka menerima dengan baik adanya organisasi Puspita Bahari karena dapat membantu tugas dari pemerintah dalam kinerjanya yang dapat dikatakan belum maksimal. Penerimaan positif juga datang dari LBH APIK Semarang yang telah menjadi jejaring organisasi Puspita Bahari semenjak tahun 2007.

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Nur Kasanah selaku Koordinator Divisi Internal LBH APIK Semarang:

“Puspita Bahari menjadi inspirasi bagi kita, meskipun mereka sudah menjadi korban mereka sudah berani berbicara di ranah public. Tingkat royalnya sangat tinggi, sudah bisa keluar meskipun berkeluarga sudah bisa mengatur waktu, karena tidak mudah untuk keluar rumah. Mereka sudah berani mencari pengakuan untuk pekerjaan yang tidak diakui”.⁹³

Dapat disimpulkan Puspita Bahari tidak hanya membangun hubungan yang kuat dengan organisasi lokal dalam rangka keberlanjutan organisasi namun juga dengan jaringan nasional yang berdampak pada eksistensi Puspita Bahari diluar lingkup kerja organisasi.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Kasanah selaku Koordinator Divisi Internal LBH APIK Semarang pada tanggal 7 Januari 2019, pukul 10.43 WIB di Kantor LBH APIK Semarang